

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA
ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LPSE KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA**

Michael Nelsen Lumintang¹, Vecky A.J. Masinambow², Een N. Walewangko³
mnlumintang@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Belanja Konstruksi, Belanja Konsultasi dan Belanja Barang terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Secara parsial Belanja Konstruksi berpengaruh terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018, (2) Secara parsial Belanja Konsultasi berpengaruh terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018, (3) Secara parsial Belanja Barang tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018 dan (4) Secara simultan Belanja Konstruksi, Belanja Konsultasi dan Belanja Barang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018

Kata kunci : belanja konstruksi, belanja konsultasi, belanja barang, belanja langsung

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Construction Shopping, Consultation Shopping and Goods Expenditures Shopping on Direct Shopping in the Southeast Minahasa District Work Unit (SKPD) in 2014-2018. The data analysis method that will be used in this study is the panel data regression model. The results of the study show that: (1) Partially Construction Shopping influences Direct Expenditures in the Regional Ministries Work Unit (SKPD) of Southeast Minahasa Regency in 2014-2018, (2) Partially Consultants Shopping influences Direct Expenditures in the Regional Work Units (SKPD) Southeast Minahasa Regency in 2014-2018, (3) Partially the Goods Shopping do not influence Direct Expenditure in the Regional Ministries Work Unit (SKPD) of Southeast Minahasa Regency in 2014-2018 and (4) Simultaneously Construction Shopping, Consultancy Shopping and Goods Shopping have a significant effect on Direct Expenditure in the Southeast Minahasa Regency 2014-2018 Regional Ministries Work Unit (SKPD)

Keywords : construction shopping, consulting shopping, goods expenditures shopping, capital expenditure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini dunia sedang mengalami perubahan yang cepat dengan adanya revolusi industri 4.0 teknologi digital berkembang dengan cepat di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Adiningsih, 2019). Revolusi Industri 4.0 yang tengah dirasakan dan diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup populasi dan tatanan kehidupan di seluruh dunia dan diprediksi akan membuat perubahan sosial dan pergeseran segi bisnis. Produktivitas dan efisiensi merupakan afeksi jangka panjang yang akan dirasakan dalam revolusi industri digital ini, maka dari itu pemerintah harus bisa memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat ini untuk dapat meraih tingkat efektivitas suatu produksi dan konsumsi yang lebih tinggi dan juga pengembangan ke pasar-pasar baru.

Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi menimbulkan kebutuhan penyimpanan data yang besar. Hal itu mendorong perkembangan *cloud computing* dan *big data* sebagai infrastrukturnya (Adiningsih, 2019). Pengolahan dan pemanfaatan data yang masif atau yang biasa dikenal dengan teknologi big data telah menjadi faktor penting yang melandasi terobosan tersebut. Kini data bukan lagi faktor pelengkap, namun telah menjadi senjata utama untuk memenangi persaingan di berbagai bidang. Salah satu dampak yang dirasakan adalah penggunaan aplikasi oleh pemerintah oleh LPSE.

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem *e-procurement* bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). LPSE sering dirancukan dengan sistem *e-procurement* (pengadaan secara elektronik). Implementasi *e-procurement* di Indonesia ditugaskan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, <http://www.lkpp.go.id>). LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *free license* untuk diterapkan seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Mulai diterapkan pada tahun 2008 oleh 11 instansi dan tahun 2019 ini sudah 688 K/L/D/I (kementerian/lembaga/daerah/instansi) yang memiliki LPSE.

SPSE merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Instansi pemerintah di Indonesia sangat beraneka ragam begitu pula dengan anggaran yang mereka miliki. Ada instansi daerah yang memiliki anggaran lebih dari 7 triliun dan ada pula yang hanya puluhan hingga ratusan miliar saja per tahun. Kondisi ini menjadi pertimbangan LKPP dalam mengembangkan sistem *e-procurement* SPSE.

SPSE dikembangkan dengan semangat *free license*. Instansi dengan anggaran yang terbatas tetap dapat menerapkan SPSE karena tidak diperlukan biaya lisensi kecuali pembelian server dan sewa akses internet. SPSE dikembangkan menggunakan Java dan database PostgreSQL sehingga dapat berjalan di Platform Linux. SPSE dikembangkan sejak tahun 2006 dengan mengacu *business process* yang tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam mengembangkan SPSE, LKPP melibatkan instansi-instansi terkait yaitu Lembaga Sandi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lembaga Sandi Negara mengembangkan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). Dokumen penawaran dari peserta lelang di-enkripsi dan di-dekripsi menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). Sub sistem e-audit dikembangkan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang memungkinkan SPSE mengeluarkan informasi detail tentang proses lelang untuk keperluan audit.

LPSE merupakan unit yang dibentuk oleh sebuah instansi untuk mengoperasikan sistem *e-procurement* SPSE. Pada awalnya LPSE hanya sebagai tim ad hoc yang dibentuk oleh kepala instansi (Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati). Pada perkembangan selanjutnya, sebagian instansi telah mendirikan LPSE secara struktural seperti di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan

Provinsi Sumatera Barat. Pada proses pengadaan LPSE hanya sebagai fasilitator yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Pengadaan barang/jasa di Indonesia pada awalnya dilaksanakan dengan pedoman Kepres RI No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya dan terakhir yang digunakan adalah Perpres No. 16 Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, proses pemilihan penyedia jasa dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pemilihan/seleksi. *E-procurement* merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi. Proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-procurement* memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan untuk mendukung proses pelelangan umum secara elektronik. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian ini yaitu, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (*e-procurement*) di LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara”.

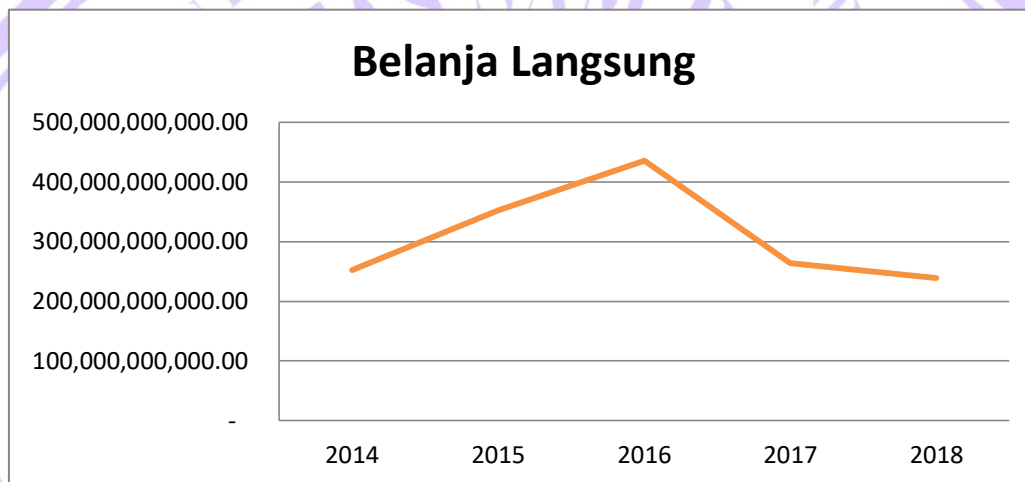
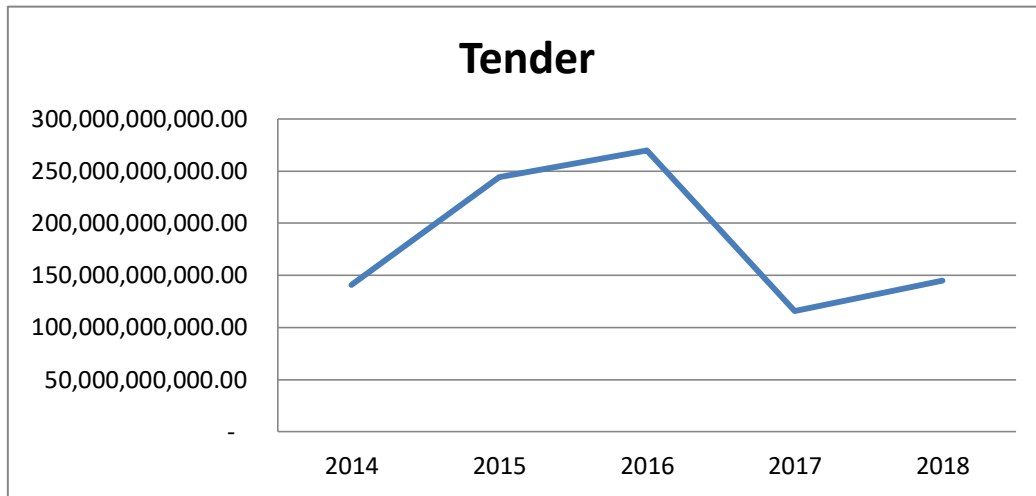
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui mekanisme tender (paket konstruksi, konsultansi dan belanja barang) serta jumlah belanja langsung untuk 10 Satuan Kerja Pngkat Daerah (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2014-2018 (Tabel 1) :

Tabel 1
Data Tender dan Belanja Langsung di Kabupaten Mitra

Tahun	Tender	Persentase	Belanja Langsung	Persentase
2014	Rp. 140.787.522.000	-	Rp. 252.722.098.813	-
2015	Rp. 244.128.827.279	73,40	Rp. 352.521.884.517	39,49
2016	Rp. 269.526.881.127	10,40	Rp. 435.511.692.128	23,54
2017	Rp. 115.782.009.963	-57,04	Rp. 264.071.315.580	-39,37
2018	Rp. 144.700.060.604	24,98	Rp. 238.689.236.361	-9,61

Sumber : LPSE Kabupaten Mitra, 2020

Tabel 1 menunjukkan Data Tender dan Belanja Langsung di Kabupaten Mitra. Tahun 2015 dan tahun 2016 anggaran tender mengalami peningkatan dan pada tahun 2017 anggaran tender mengalami penurunan dan pada tahun 2018 anggaran tender mengalami peningkatan. Tahun 2015 dan tahun 2016 belanja langsung mengalami peningkatan dan pada tahun 2017 dan tahun 2018 belanja langsung mengalami penurunan. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan perubahan anggaran tender dan belanja langsung



Jika dihubungkan antara anggaran tender (pengadaan barang dan jasa secara elektronik) termasuk didalamnya anggaran belanja langsung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara maka dapat terlihat bahwa besarnya pengaruh anggaran pengadaan barang dan jasa secara elektronik terhadap makro ekonomi. Hal ini terlihat dari meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), meningkatnya prosentasi Pertumbuhan Ekonomi (PE), serta meningkatnya prosentasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2010 sampai tahun 2019.

Gambaran tentang Kabupaten Minahasa Tenggara dari aspek variabel makro ekonomi tersebut terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2
Data Makro Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun	PDRB (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indeks Pembangunan Manusia (%)
2010	2.131.968,23	-	-
2011	2.234.172,40	4,79	66,07
2012	2.375.259,40	6,31	67,1
2013	2.527.706,04	6,42	67,34
2014	2.693.963,36	6,57	67,86
2015	2.863.530,17	6,29	68,05
2016	3.044.362,22	6,31	68,42
2017	3.238.027,65	6,36	68,91
2018	3.432.522,71	6,00	69,66
2019	3.639.341,18	6,02	70,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan, 2020

Tabel 2 menunjukkan data makro ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. Dapat dilihat bahwa PDRB mengalami peningkatan selama tahun 2010 sampai tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi terjadi prosentasi yang fluktuatif dimana terjadi peningkatan tahun 2011 sampai tahun 2014, kemudian mengalami penurunan tahun 2015, kenaikan kembali tahun 2016 dan 2017, mengalami penurunan tahun 2018 dan kembali naik tahun 2019. Indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan selama tahun 2011 sampai tahun 2019.

Penelitian Nurchana (2014) tentang Efektivitas E-Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Aplikasi Pengadaan E-Pengadaan Barang/Jasa di Bojonegoro). Menunjukkan bahwa hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa aplikasi *e-procurement* dalam memasok barang/jasa kurang dan belum mencapai tujuan. Penelitian Hidayat (2015) Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip *e-procurement* di Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, yakni kelembagaan ULP, Infrastruktur, dan SDM. Penelitian Setyadiharja (2014) dilakukan di LPSE Provinsi Kepulauan Riau, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan juga vendor yang memasok layanan dan barang, yang telah menggunakan sistem tersebut. Hasil penelitian ini dengan jelas menyatakan bahwa bahkan sistem *e-procurement* Kepulauan Provinsi Riau efektif, dan proses politik merupakan faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengadaan elektronik. Pentingnya melakukan perbaikan dalam proses pengadaan barang dan jasa baik di pemerintah pusat maupun daerah jumlah anggarannya terus mengalami peningkatan. Namun berdasarkan data diatas dapat dilihat penurunan anggaran pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami penurunan. Sehingga berdasarkan latar belakang maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara dengan menganalisa seberapa besar pengaruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) baik :

1. Apakah terdapat pengaruh Belanja Konstruksi, Belanja Konsultasi dan Belanja Barang terhadap Belanja Langsung di Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh Belanja Konstruksi terhadap Belanja Langsung di Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh Belanja Konsultasi terhadap Belanja Langsung di Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018?
4. Apakah terdapat pengaruh Belanja Barang terhadap Belanja Langsung di Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara dengan menganalisa seberapa besar pengaruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) baik :

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Konstruksi, Belanja Konsultasi dan Belanja Barang terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Konstruksi terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Konsultasi terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018
4. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Barang terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi, lebih khusus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Akademisi, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi melalui penelitian yang dilakukan.
- b) Bagi Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan acuan untuk peneliti-peneliti lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c) Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak terkait untuk mengetahui faktor dominan yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun daerah sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dapat menyusun strategi dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang lebih baik di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Landasan Teori

Grand Theory

Teori Pertumbuhan Neo Klasik, Teori ini dikembangkan oleh Solow pada tahun 1956 merupakan model ekonomi dengan pendekatan umum dimana bebas mengabaikan beberapa aspek penting dari *macro economics*, seperti fluktuasi jangka pendek dalam ketenaga-kerjaan, pertumbuhan populasi, dan tabungan. Model pertumbuhan Solow merupakan model pertumbuhan yang mengasumsikan bahwa perkembangan teknologi adalah *exogenous* (Pratama dan Manurung, 2008: 141).

Menurut Putong (2013:278-283), adapun harapan dari perpaduan pemerintah dan swasta tersebut dapat mencapai keadaan perekonomian yang diidam-idamkan yaitu untuk negara-negara yang tergolong masih berkembang dan terbelakang perekonomiannya, usaha peningkatan kapasitas produksi memanglah merupakan suatu keharusan, yaitu dengan cara melakukan investasi di segala bidang yang sesuai dengan peruntukkan dan kebutuhan yang tepat. Tinggi rendahnya kapasitas produksi tergantung dari tinggi rendahnya investasi, sedangkan investasi (dalam negeri) tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri (dan suku bunga), tingkat tabungan (dalam negeri) tergantung dari tingkat bunga dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri maka peningkatan pendapatan masyarakat perlu dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengembangkan teknologi (pemberdayaan sumber daya).

Kerap kali kita mendengar istilah Revolusi Industri 4.0, era yang dikenal dengan nama *disruptive technology*. Di zaman ini, siapapun yang tidak cepat tanggap mengadopsi teknologi perlahan akan tertinggal dengan teknologi yang lebih baru dan maju. Secara masif, hal ini tentu saja berpengaruh pada perilaku berbisnis dan kondisi ekonomi global, sehingga lahirlah ekonomi digital.

Pengadaan Barang dan Jasa

Wardiyanto (2012) mendefinisikan barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak, baik secara berkelompok maupun secara umum. Menurut Arrowsmith (2004), Nur Bahagia (2006), Christopher & Schooner (2007) pada prinsipnya pengadaan adalah : “kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan, baik untuk kepentingan publik maupun privat”. Pengadaan barang/jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan, untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode, proses sesuai dengan ketentuan agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang/jasa. Agar pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak yaitu PPK, Pejabat Pengadaan dan penyedia barang/jasa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.

Adapun metode/cara pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum dibagi dalam tiga bagian yaitu :

1. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. *E-purchasing*, yaitu tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (*e-catalogue*).
 - b. Pengadaan Langsung, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - c. Penunjukan Langsung, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
 - d. Tender cepat, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dimana spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah ditentukan secara rinci serta pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).

- e. Tender, yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya apabila tidak dapat dilaksanakan melalui *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender cepat.
2. Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, yang terdiri dari :
 - a. Seleksi, yaitu metode untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - b. Pengadaan Langsung, yaitu metode untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - c. Penunjukan Langsung, yaitu metode untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi dalam keadaan tertentu.
3. Metode Pemilihan Melalui Swakelola,

Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga. Swakelola dapat dilaksanakan oleh pengguna barang atau jasa, instansi pemerintah, kelompok masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. Jenis pekerjaan yang memungkinkan dilaksanakan secara swakelola diantaranya adalah:

 - a) Pekerjaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan,
 - b) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang atau jasa yang bersangkutan
 - c) Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa.

Konstruksi

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek dibedakan atas hubungan fungsional dan hubungan kerja. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi maka potensi terjadinya konflik sangat besar sehingga dapat dikatakan bahwa proyek konstruksi mengandung konflik yang cukup tinggi (Ervianto, 2005).

Proyek konstruksi adalah proyek yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu bangunan infrastruktur, yang umumnya mencakup pekerjaan pokok yang termasuk dalam bidang teknik sipil dan arsitektur. Bangunan-bangunan tersebut meliputi aspek kepentingan masyarakat yang sangat luas sejak berupa perumahan untuk tempat tinggal, apartement dan gedung perkantoran berlantai banyak, pabrik dan bangunan industri, jembatan, jalan raya termasuk jalan layang, jalan kereta api, pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir, bendungan dan terowongan PLTA, saluran pengairan, sistem sanitasi dan drainase, bandar udara dan hanggar pesawat terbang, pelabuhan laut dan bangunan lepas pantai, jaringan kelistrikan dan telekomunikasi, kilang minyak dan jaringan plambing, dan lain sebagainya (Dipohusodo, 1996)

Konsultansi

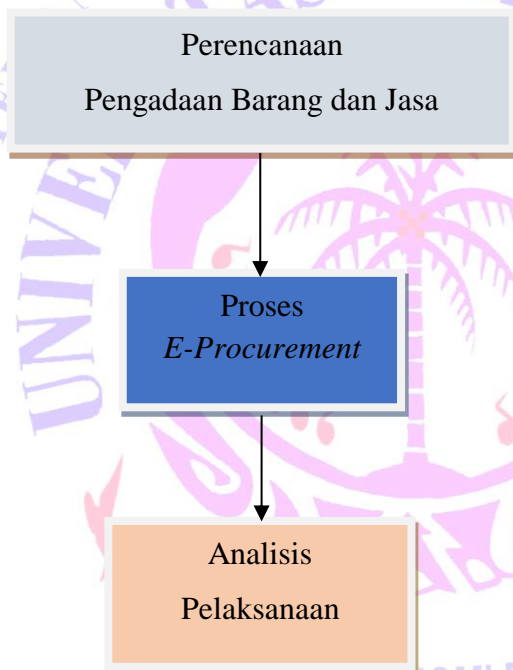
Manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Untuk itu disusun suatu struktur organisasi yang menunjukkan jalur instruksi pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya organisasi pada suatu proyek, maka akan memudahkan manajemen pengelolaannya sehingga

padawaktu pelaksanaan sesuai dengan rencana. Demikian pula biaya dan kualitas pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. (Ervianto, 2005)

Manajemen dalam suatu proyek konstruksi bukan saja hanya bertujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar atau sesuai rencana, tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Tetapi tujuan lain dari manajemen konstruksi juga tidak dapat dilepaskan begitu saja, yaitu kualitas dari hasil pembangunan. Tercapainya kualitas yang sesuai dengan perencanaan sangat ditentukan oleh pelaksanaan manajemen dilapangan dan pelaksanaan manajemen dipengaruhi oleh hubungan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan manajemen konstruksi di lapangan, dibutuhkan konsultan yang dapat bertindak secara professional. Konsultan professional adalah perseorangan atau perusahaan yang memiliki keahlian, kecakapan dan bakat khusus dan tersedia bagi yang memerlukan (klien), dengan imbalan sejumlah upah. Konsultan professional memberikan nasehat dan seringkali membantu melaksanakan nasehat tersebut dengan dan untuk klien. (Shenson, 1990)

Model Penelitian

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



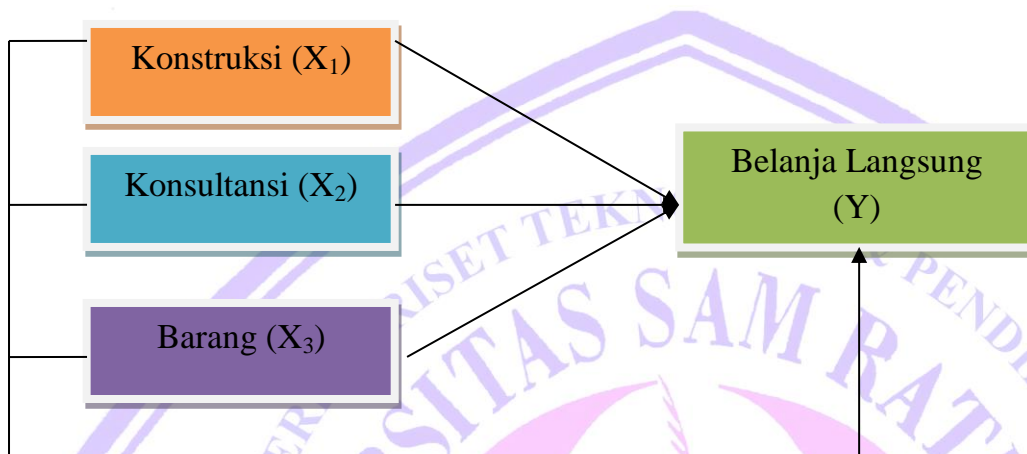
Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Gambar 1 menunjukkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dilihat bahwa pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *e-procurement* dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis pelaksanaan.

Tahap awal dimulai dengan perencanaan yaitu (1) Identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa diawali dengan berbagai aktivitas seperti analisis, survey dan riset mengenai barang/jasa. (2) Penetapan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan K/L/PD dilakukan dengan melihat paket dan prioritas pengadaan barang/jasa. (3) Cara pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan K/L/PD dilakukan dengan melihat kesesuaian paket untuk diadakan melalui swakelola atau melalui penyedia. (4) Pada tahap perencanaan ini, yang dimaksud jadwal pengadaan barang/jasa adalah membuat jadwal secara keseluruhan

kegiatan pengadaan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penutupan pengadaan. (5) Menyusun anggaran pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan K/L/PD dilakukan dengan cara menghitung setiap aktivitas lalu mengumpulkannya dalam paket pekerjaan. Dan (6) Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang juga merupakan proses *output* dalam pengadaan barang/jasa.

Setelah perencanaan pelaksanaan barang dan jasa, pemrosesan perencanaan dengan menggunakan *e-procurement* dan pelaksanaannya dianalisis dengan cara :



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian dirancang melalui langkah-langkah penelitian dari mulai operasionalisasi variabel, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, model penelitian diakhiri dengan merancang analisis data dan pengujian hipotesis. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif (Sugiyono, 2012:5).

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah Kota Ratahan dan tempat pengumpulan data di LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Waktu penelitian diperkirakan selama 3 bulan.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah :

1. Data belanja langsung 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2014-2018.
2. Data mengenai pengadaan barang dan jasa secara elektronik di LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara baik pengadaan konstruksi, konsultasi maupun pengadaan barang tahun anggaran 2014-2018.
3. Gambaran tentang *e-procurement*.

Metode Analisis

Regresi Data Panel

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Adapun kelebihan dari penggunaan metode data panel adalah sebagai berikut:

- a. Data panel mampu menyediakan lebih banyak data, sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap, sehingga dapat diperoleh *degree of freedom (df)* yang lebih besar sehingga estimasi yang dihasilkan akan lebih baik.
- b. Data panel mampu mengurangi kolinearitas variabel.
- c. Dapat menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
- d. Dengan menggabungkan informasi *time series* dan *cross section*, maka dapat mengatasi masalah yang timbul karena adanya masalah penghilang variabel.
- e. Data panel lebih mampu mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana dilakukan oleh data *time series* murni maupun *cross section* murni.
- f. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregat individu, karena data diobservasi lebih banyak.

Data yang tergolong kedalam data panel yaitu bersifat *time series* dan *cross section*. Persamaan regresinya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_i X_{it} + e_{it}$$

Untuk $i = 1, 2, \dots, N$

$t = 1, 2, \dots, T$

dimana N adalah jumlah unit/individu (*cross section*) dan

T adalah jumlah periode waktunya (*time series*).

Dari *Common Effect Model* ini akan dapat dihasilkan $N+T$ persamaan, yaitu sebanyak T persamaan *cross section* dan sebanyak N persamaan *time series*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

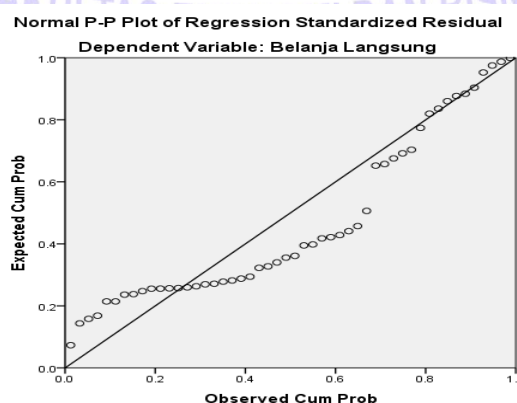
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

Gambar 2

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



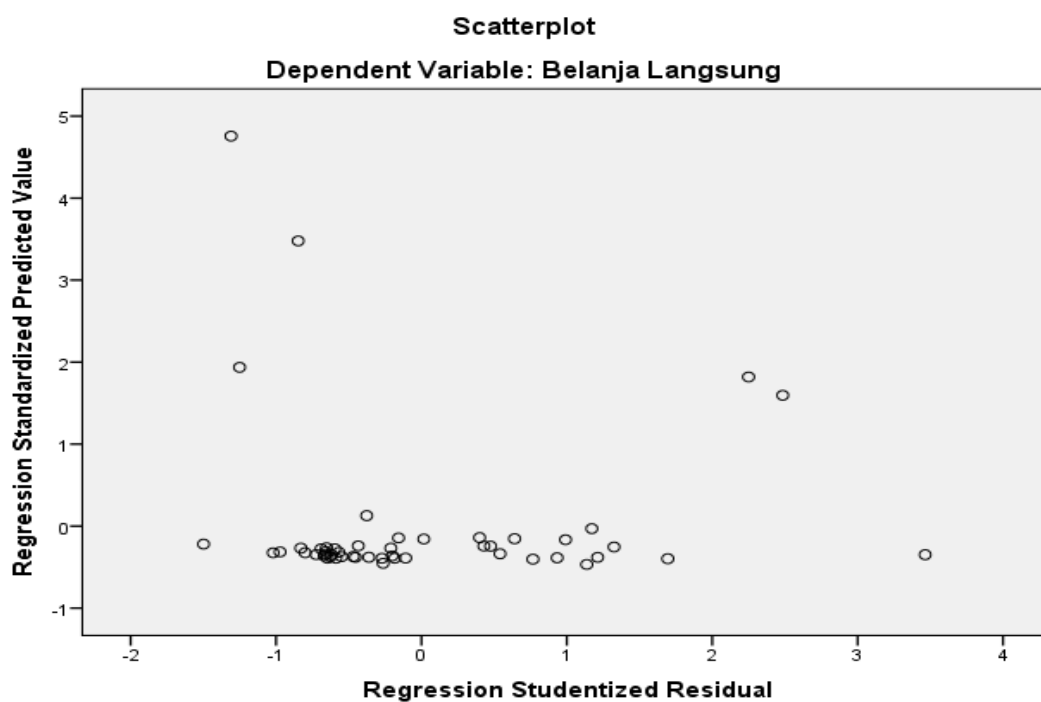
Sumber : Olah data SPSS 20, 2020

Gambar 2 menunjukkan bahwa pernyataan bahwa tidak terdapat masalah pada uji normalitas karena berdasarkan grafik di atas terlihat titik-titik koordinat antara nilai observasi dengan data mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki data yang berdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah varian dari residual tidak sama untuk semua pengamatan, yang menyebabkan estimator menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi. Jika dari suatu pengamatan tersebut terdapat varian yang berbeda, maka disebut heterokedastisitas.

Gambar 3
Scatterplot



Sumber : Olah data SPSS 20, 2020

Gambar 3 menunjukkan bahwa uji heterokedastisitas menampilkan titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas terbentuk serta dalam penyebaran titik-titik tersebut menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut mengidentifikasi tidak terjadinya heterokedastisitas pada model regresi, sehingga data layak dipakai.

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua bebas berkorelasi kuat jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel.

Tabel 3
Collinearity Model

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Konstruksi	.126	7.921
Konsultansi	.127	7.891
Barang	.987	1.013

Sumber : Olah data SPSS 20, 2020

Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai VIF < 10. Hasil perhitungan menghasilkan nilai dibawah angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi tersebut.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4
Regresi Data Panel

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	9975215917.315	2559196631.112		3.898	.000		
Konstruksi	1.584	.115	1.226	13.771	.000	.126	7.921
Konsultansi	-23.695	7.817	-.269	-3.031	.004	.127	7.891
Barang	1.541	1.070	.046	1.440	.157	.987	1.013

Sumber : Olah data SPSS 20, 2020

Persamaan Regresi $Y = 9.975.215.917,315 + 1.584X_1 - 23,695X_2 + 1,541X_3$ menggambarkan bahwa variabel bebas (*independent*) Belanja Konstruksi (X_1), Belanja Konsultansi (X_2), dan Belanja Barang (X_3) mempengaruhi variabel tetap (*dependent*) Belanja Langsung (Y). Berikut ini adalah interpretasinya :

- Konstanta (α) sebesar 9.975.215.917,315 memberikan pengertian bahwa jika Belanja Konstruksi (X_1), Belanja Konsultansi (X_2) dan Belanja Barang (X_3) sama dengan nol (0) maka besarnya Belanja Langsung (Y) sebesar 9.975.215.917,315 satuan.
- Jika nilai b_1 yang merupakan koefisien regresi dari Belanja Konstruksi (X_1) sebesar 1.584 yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel Belanja Konstruksi (X_1) bertambah 1 satuan, maka Belanja Langsung (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1.584 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.
- Jika nilai b_2 yang merupakan koefisien regresi dari Belanja Konsultansi (X_2) sebesar -23.695 yang artinya mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel Belanja Konsultansi (X_2) bertambah 1 satuan, maka Belanja Langsung (Y) akan mengalami penurunan sebesar 23.695 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.
- Jika nilai b_3 yang merupakan koefisien regresi dari Belanja Barang (X_3) sebesar 1.541 yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel Belanja

Barang (X_3) bertambah 1 satuan, maka Belanja Langsung (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1.541 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

Uji Hipotesis F dan t

Tabel 5
Uji Hipotesis F dan t

Model	Uji t		Uji F	
	T	Sig	F	Sig
Konstruksi	13.771	.000	317.761	.000 ^b
Konsultansi	-3.031	.004		
Barang	1.440	.157		

Sumber : Olah data SPSS 20, 2020

- a. $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Belanja Konstruksi, Belanja Konsultansi dan Belanja Barang terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018
 $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$: Terdapat pengaruh Belanja Konstruksi, Belanja Konsultansi dan Belanja Barang terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018
- b. $H_0 : \beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Belanja Konstruksi terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018.
 $H_a : \beta_1 \neq 0$: Terdapat pengaruh Belanja Konstruksi terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018
- c. $H_0 : \beta_2 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Belanja Konsultansi terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018.
 $H_a : \beta_2 \neq 0$: Terdapat pengaruh Belanja Konsultansi terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018
- d. $H_0 : \beta_3 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Belanja Barang terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018.
 $H_a : \beta_3 \neq 0$: Terdapat pengaruh Belanja Barang terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018.

Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa Belanja Konstruksi (X_1) memiliki tingkat signifikansi p-value = 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau Belanja Konstruksi (X_1) berpengaruh terhadap Belanja Langsung (Y). Belanja Konsultansi (X_2) memiliki tingkat signifikansi p-value = 0,004 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau Belanja Konsultansi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung (Y). Belanja Barang (X_3) memiliki tingkat signifikansi p-value = 0,157 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak atau Belanja Barang (X_1) tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung (Y). Hasil analisis didapatkan Uji Simultan (uji F) dengan tingkat signifikan p-value = 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti bahwa Belanja Konstruksi (X_1), Belanja Konsultansi (X_2), dan Belanja Barang (X_3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung (Y).

Koefisien Korelasi Berganda (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.977 ^a	.954	.951	12269320596.51517

Sumber : Olah data SPSS 20, 2020

Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai Koefisien Korelasi Berganda (R) yang dihasilkan pada model 1 adalah sebesar 0.977 artinya mempunyai hubungan sangat kuat. Nilai Koefisien Determinasi (R²) adalah 0,954 atau 95,4% Artinya Belanja Konstruksi (X₁), Belanja Konsultansi (X₂) dan Belanja Barang (X₃) dapat menjelaskan variasi Belanja Langsung (Y) sebesar 95,4% dan sisanya sebesar 4,6% diterangkan oleh variabel lain.

PENUTUP**Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial Belanja Konstruksi berpengaruh terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018
2. Secara parsial Belanja Konsultansi berpengaruh terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018
3. Secara parsial Belanja Barang tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018
4. Secara simultan Belanja Konstruksi, Belanja Konsultansi dan Belanja Barang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2014-2018

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara harus memperhatikan faktor pengadaan barang/jasa Belanja Konstruksi dan Belanja Konsultansi dalam mempengaruhi Belanja Langsung.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya pengaruh pengadaan barang/jasa Belanja Konstruksi, Belanja Konsultansi dan Belanja Barang secara elektronik terhadap Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih. 2019.** Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia. Gramedia. Jakarta.
- Arrowsmith, S. (2004).** *Public Procurement: An Appraisal of the UNCITRAL Model. Law as a Global Standard. International Law & COMP Quarterly.*

- Hidayat (2015).** Penerapan e-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/10155>.
- Hidayat, S. S. dkk. (2015).** Penerapan prinsip *e-procurement* pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Nurchana. (2014).** Efektivitas E-Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Aplikasi. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AHmjW2E3O7AJ:administ-rasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/385+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Nur. (2006).** "Sistem Inventori", Bandung: Penerbit ITB.
- Sugiyono. (2012).** Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Setyadiharja. (2014).** *E-Procurement System Technology: An Analysis in Electronic Procurement Service Unit (LPSE) of Kepulauan Riau Province*.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5XD1vpZJH8J:https://media.neliti.com/media/publications/57297-EN-e-procurement-system-technology-analy.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Pratama, Raharja dan Manurung, Mandala. (2008).** Teori Ekonomi Mikro. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Putong, Iskandar. (2013).** Economics Pengantar Mikro dan Makro. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Wardiyanto. (2012).** Kebijakan *E-procurement*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.